



ELANG KHARISMA DEWIRANGGA/RADAR JOGJA  
**BUTUH PERHATIAN:** Salah satu kawasan pinggir kali (girli) di Kota Jogja yang masuk dalam kategori kawasan kumuh. Berbagai program dilakukan Pemkot Jogja untuk melakukan penataan kawasan ini dengan pendekatan khusus agar masyarakat bisa memahami tujuan program pemerintah.

# Masih Ada 80,94 Hektare Kawasan Kumuh

Di Kota Jogja Mayoritas Berada di Pinggiran Kali

**JOGJA** - Kota Jogja ternyata masih menyisakan banyak kawasan kumuh. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja mencatat luasnya mencapai 80,94 hektare.

Kepala DPUPKP Kota Jogja Umi Akhsanti mengatakan, mayoritas kawasan kumuh itu berada di kawasan girli atau singkapan dari pinggir kali.

Dijelaskannya, penetapan kawasan kumuh di Kota Jogja berdasar Surat Keputusan (SK) Wali Kota Jogja Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam keputusan tersebut kawasan kumuh di Kota Jogja ditetapkan sebesar 114,72 hektare.

Menurut Umi, hingga akhir tahun 2023 lalu pemerintah kota (pemkot) mampu mengatasi 33,78 hektare luasan kumuh. Jumlah itu setara 29,45 persen total luasan kumuh yang ditetapkan. "Sehingga sisa luasan kawasan kumuh masih 80,94 hektare," ujar Umi, kemarin (21/10).

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto menyampaikan, pihaknya terus berupaya mengurangi kawasan kumuh. Kendati demikian, proses penataan kawasan bukan sekadar pelaksanaan teknis saja. Lantaran dalam pelaksanaannya, ada permasalahan psikologis, sosial dan budaya yang perlu untuk diperhatikan. Sehingga perlu berbagai upaya pendekatan agar masyarakat bisa memahami tujuan program pemerintah.

Sugeng menjelaskan, dalam mengembangkan konsep penataan wilayah kumuh di kawasan girli pihaknya menggunakan berbagai metode pendekatan. Yakni melalui cara-cara yang komunikatif dan mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk mengambil kebijakan serta masyarakat.

Bahkan program *Munggah Mundur Madhep Kali* (M3K) yang digaungkan pemkot pun memerlukan upaya kompleks untuk penerapannya di lapang-

an. Terlebih penataan kawasan pinggir sungai sering melibatkan lahan *Sultanaat Grand*. "Sehingga memerlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor terkait untuk mewujudkan kawasan yang tertata baik," katanya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jogja yang juga Ketua Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Jogja Agus Tri Haryono menerangkan, program M3K telah dilakukan di kawasan Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Manunggal. Jumlah yang berhasil ditangani mencapai 370 unit rumah.

(inu/din/hep)



## PENANGANAN KAWASAN KUMUH DI KOTA JOGJA

- Luasnya: 80,94 hektare.
- Mayoritas kawasan pinggir kali.
- Hingga akhir 2023 pemkot mampu atasi 33,78 hektare.
- Penataannya terkendala psikologis, sosial, dan budaya.
- Penataan kawasan pinggir sungai sering melibatkan lahan SG
- Terapkan program *Munggah Mundur Madhep Kali* (M3K)
- M3K dilakukan di kawasan Sungai Winongo, Sungai Code, Sungai Gajah Wong, dan Sungai Manunggal
- Jumlah yang berhasil ditangani mencapai 370 unit rumah
- Pemkot Lakukan penataan dengan konsep Perumahan dan Permukiman Layak Huni (Mahannani)
- Apabila pola pemugaran M3K terkendala, pemkot akan melakukan penataan dengan konsep Perumahan dan Permukiman Layak Huni (Mahannani).
- Konsep Mahannani telah diterapkan di kelurahan Terban sebagai kawasan penyangga ekonomi wisata Malioboro dan dibangun dengan konsep wisata Riverside Pedestrian.

SURVEI: HEBPIRI KARTUNERANGGA JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 November 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005